

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.678, 2011

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. Standard Operating Procedures. Pelaksanaan. Tugas. Fungsi

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011 **TENTANG**

STANDARD OPERATING PROCEDURES DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal yang optimal, diperlukan Standard Operating Procedures untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Standard Operating Procedures di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal:
- 25 Tahun Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURES DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Operating Procedures di lingkungan Badan Standard Penanaman Modal digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2

Standard Operating Procedures di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2011 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

DAFTAR ISI STANDARD OPERATING PROCEDURES UNIT SEKRETARIAT UTAMA

A. Pusat Pengolahan Data dan Informasi

- 1. Pembuatan Buku Laporan Perkembangan Penanaman Modal
- 2. Permintaan Data
- 3. Updating Data Statistik Penanaman Modal ke Website BKPM
- 4. Backup Database
- 5. Penyajian Data Rutin
- 6. Pembuatan / Pengembangan Database
- 7. Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Jaringan BKPM
- 8. Penanganan Masalah Aplikasi
- 9. Pembangunan dan Pengembangan Sistem

B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

- 1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparat Daerah
- 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
- 3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan
- 4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
- 5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur BKPM

C. Biro Perencanaan Program dan Anggaran

- 1. Penyusunan Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BKPM
- 2. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- 3. Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan BPPA
- 4. Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit BPPA
- 5. Penyiapan Jawaban Tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait Anggaran BKPM

- 6. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor BKPM
- 7. Sosialisasi Program/Kegiatan BKPM Yang Terkait Dengan Daerah
- 8. Penyusunan Laporan Evaluasi Program/Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan BKPM
- 9. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan Triwulan)
- 10. Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

D. Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan

- 1. Pelaksanaan Acara Pimpinan Dalam Kota
- 2. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Dalam Negeri
- 3. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Luar Negeri
- 4. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Mendampingi Kunker Pres dan Wapres
- 5. Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Pimpinan BKPM
- 6. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Dalam Negeri
- 7. Pengordinasian Pengendalian dan Pengurusan Surat masuk Keluar
- 8. Prosedur Pembuatan Kliping Berita Investasi
- 9. Prosedur Perizinan Melakukan Wawancara dengan Pimpinan BKPM
- 10. Kunjungan dari Instansi lain
- 11. Prosedur Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan
- 12. Prosedur Pelaksanaan Jumpa Pers dengan Media
- 13. Kunjungan Kerja dengan DPR RI
- 14. Prosedur Pencetakan dan Penjilidan Buku Dokumentasi Berita Investasi
- 15. Prosedur Pemasangan Iklan Media Cetak
- 16. Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI

- 17. Penghimpunan dan Dokumentasi Peraturan Sektoral dan Peraturan Daerah
- 18. Ikut serta SKB-P4M
- 19. Pendistribusian Peraturan Perundang-undangan

E. Biro Umum

- 1. Pengelolaan Perpustakaan
- 2. Penataandan Penyimpanan Arsip
- 3. Pelayanan Peminjaman dan Permintaan Arsip
- 4. Pelayanan Legalisasi Arsip
- 5. Penerimaan Surat Masuk
- 6. Proses Surat Keluar
- 7. Proses Penomoran Persetujuan/Perizinan Penanaman Modal
- 8. Penggandaan Dokumen
- 9. Pengiriman Tembusan
- 10. Penetapan Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan BKPM
- 11. Pemberian Kenaikan Pangkat Pejabat dan Karyawan di lingkungan BKPM
- 12. Pelayanan Administrasi Pemberhentian/Pensiun Pegawai
- 13. Pemutakhiran Data Kepegawaian
- 14. Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
- 15. Pengusulan dan Evaluasi Organisasi
- 16. Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja di Lingkungan BKPM
- 17. Pelayanan Pembayaran Gaji
- 18. Pelayanan Pembayaran Tunjangan Khusus
- 19. Pelayanan Pembayaran Uang Makan
- 20. Pelayanan Permohonan Pencairan Anggaran/Verifikasi Pembayaran langsung (LS)
- 21. Pelayanan Permohonan Pencairan Anggaran/Verifikasi Tambahan Uang Persediaan (TUP)
- 22. Penerbitan Surat Keterangan Penghasilan
- 23. Pelayanan Permohonan Pencairan Anggaran/Verifikasi